LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAPEUNADANA TAHUN 2025

BANK TAPEUNADANA
PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapeunadana

JL. MARGONDA RAYA NO. 263 KEMIRI MUKA - BEJI, DEPOK
TELEPON: 021-77212379

PT BPR TAPEUNADANA
JL. MARGONDA RAYA NO. 263 KEMIRI MUKA - BEJI, DEPOK
Telepon: 021-77212379
Website: www.banktapeunadana.com, , Email: tapeunadana@yahoo.com

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	**PT BPR TAPEUNADANA**
Alamat	**Jl. Margonda Raya No. 263 Depok 16423**
Nomor Telepon	**021-7521150**

Penjelasan Umum:

PT. BPR TAPEUNADANA selanjutnya disebut "Bank" adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 02 Agustus 1994 berdasarkan akta Notaris Chufran Hamal, SH No. 6 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. Kep-158/KM.17/1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 55 tanggal 12 Juli 2005 Tambahan No. 7261. Pada tahun 2008 telah dilakukan perubahan anggaran dasar perseroan sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dengan akta Notaris Titiek Soebekti No.07 tanggal 12 Juni 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-47454.AH.01.02 tahun 2008 Tanggal 04 Agustus 2008 dan telah pula dilaporkan ke Bank Indonesia dengan surat No. 031/DEPO/BI/0808 tanggal 27 Agustus 2008. Bank telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai Izin usaha BPR No.7/39/KEP.GBI/2005 tanggal 11 Juli 2005 dengan lokasi kantor Pusat di Jl. Margonda Raya No.23 B-2 Depok Jawa Barat. Sampai dengan tahun 2024 perusahaan belum memiliki Kantor Cabang dan Kantor Kas.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanyanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/ POJK.03/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/ SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, serta Peratiran Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah maka dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Semester 1 Tahun 2025.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	**2. Baik**

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini

tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Nama **DARNIADI**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Direktur utama memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Menciptakan struktur pengendalian internal, dan bertanggung jawab penuh atas keputusan Perseroan untuk kepentingan tujuan Perseroan.

2. Nama **ASNAWI, SE**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Bertanggung jawab untuk mengawal peraturan kebijakan dalam Perseroan dan membuat kebijakan sesuai dengan ketentuan Kebijakan OJK.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Dewan Direksi di pilih berdasarkan RUPS dan Dewan Komisaris telah memberikan nasihat-nasihat kepada dewan direksi. Pemberian nasihat dan pengawasan dilakukan demi kepentingan dari perseroan tersebut. Dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Tugas dan Tanggung jawab yang di jalankan Direksi telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1. Nama **BUSTARI MANSYUR**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Dewan komisaris dapat melakukan pengawasan pada kebijakan perusahaan. Dewan komisaris dapat melakukan pengawasan pada operasional pengurusan secara umum. Baik hal yang terkait dengan perseroan maupun usaha perseroan. Dewan komisaris dapat memberikan nasihat- nasihat kepada dewan direksi. Pemberian nasihat dan pengawasan dilakukan demi kepentingan dari perseroan tersebut. Dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris akan melakukan tugasnya dengan penuh perhatian, maksud yang baik serta bertanggung jawab demi kepentingan perusahaan tersebut. Dewan komisaris harus ikut bertanggung jawab bila ada kerugian yang dialami perusahaan, jika mereka lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Nama **ASTRI NOVANITA ALI**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Memberikan perintah pada perusahaan, dengan menerapkan berbagai kebijakan dan tujuan yang luas dari perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya. Memiliki hak

untuk mendukung, memilih, mengangkat bahkan memberikan penilaian pada kinerja direksi perusahaan yang dipimpinnya. Bertugas untuk memastikan bahwa sumber keuangan pada perusahaan tersebut cukup. Bertugas untuk melakukan pengesahan pada anggaran tahunan. Bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada para pemilik saham.

Rekomendasi Kepada Direksi:

Komisaris merekomindasikan kepada Direksi dalam bentuk nasihat dan saran agar Bank menjalankan dalam bisnisnya menerapkan pinsip kehati-hatian.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan dengan tidak melanggar Peraturan OJK dan Perundang-undangan

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

BPR Tapeunadana saat ini belum memiliki komite selain komite kredit

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

BPR Tapeunadana saat ini belum memiliki komite selain komite kredit

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	**DARNIADI**
	Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**
2.	Nama	**ASNAWI, SE**
	Persentase Kepemilikan (%)	**0,12**

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
1.	Nama	**BUSTARI MANSYUR**
	Persentase Kepemilikan (%)	**2,49**
2.	Nama	**ASTRI NOVANITA ALI**
	Persentase Kepemilikan (%)	**66,94**

Direksi yang memiliki saham pada BPR Tapeunadana saat ini hanya Direksi Kepatuhan dan Anggota Dewan Komisaris telah memiliki saham pada BPR Tapeunadana

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Nama	**DARNIADI**
Nama Kelompok Usaha BPR	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	**0,00**

Nama	**ASNAWI, SE**
Nama Kelompok Usaha BPR	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	**0,00**

Nama	**BUSTARI MANSYUR**
Nama Kelompok Usaha BPR	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	**0,00**

Nama	**ASTRI NOVANITA ALI**
Nama Kelompok Usaha BPR	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	**0,00**

Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lainnya tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR selain pada BPR Tapeunadana

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Nama	**DARNIADI**
Nama Bank/Perusahaan Lain	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**
Nama	**ASNAWI, SE**
Nama Bank/Perusahaan Lain	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**

Nama	**BUSTARI MANSYUR**
Nama Bank/Perusahaan Lain	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**
Nama	**ASTRI NOVANITA ALI**
Nama Bank/Perusahaan Lain	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**

Direksi dan Komisaris BPR Tapeunadana saat ini tidak memiliki saham pada Perusahaan lain

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Nama	**DARNIADI**
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**

Nama	**ASNAWI, SE**
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**

Nama	**BUSTARI MANSYUR**
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**

Nama	**ASTRI NOVANITA ALI**
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**

Angggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama Direksi, Komisaris serta pemegang saham lainnya

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Nama	**DARNIADI**

	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**
2	Nama	**ASNAWI, SE**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1	Nama	**BUSTARI MANSYUR**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**
2	Nama	**ASTRI NOVANITA ALI**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Angggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Direksi, Komisaris serta pemegang saham lainnya

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1 Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	**2 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	**Rp540.000.000**
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	**2 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	**Rp264.000.000**

1.2 Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	**2 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	**Rp105.000.000**
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	**2 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	**Rp21.999.996**

1.3 Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	**Rp0**

1.4 Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	**Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	**Rp0**

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	**Rp0**

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	**Rp0**

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	**2 orang**
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	**Rp54.000.000**
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	**Rp0**

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	**Rp0**

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	**2 orang**
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	**Rp40.800.000**
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	**Rp0**

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas yang di dapat oleh Direksi berupa Gaji pokok, Tunjangan Jabatan, Transportasi berupa Uang bensin, serta fasilitas lainnya berupa uang pulsa dan oli. Dewan Komisaris remunerasi yang di dapat berupa gaji pokok serta tunjangan jabatan. Kebijakan Remunerasi dan fasilitas yang didapat Dewan Komisaris serta Direksi sudah merupakan hasil keputusan pada RUPS.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio (a/b)	**1,76 : 1**

Rasio (a/b)	**2,00 : 1**

3. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	**1,20 : 1**

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	**2,50 : 1**

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	**3,84 : 1**

Pemberian gaji ini di sesuaikan dengan masa kerja serta jabatan, dan sudah termasuk dengan tunjangan yang telah di berikan BPR dalam waktu 1 tahun.

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1

Tanggal Rapat	**28 Februari 2025**
Jumlah Peserta	**6 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

1. Financial Highligts
2. Non Performing Loan (NPL)
3. Informasi Lainnya

2

Tanggal Rapat	**30 April 2025**
Jumlah Peserta	**5 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

1. Financial Highligts
2. Non Performing Loan (NPL)
3. Informasi Lainnya

Pelaksanaan rapat diadakan minimal 4 kali dalam 1 tahun, BPR Tapeunadana dalam pelaporan pada semester 1 tahun 2025 telah melaksanakan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 2 kali. Dalam pelaksaan rapat dengan Dewan Komisaris Direksi dan PE diberi arahan untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di BPR.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Nama Anggota Dewan Komisaris	**BUSTARI MANSYUR**

	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	**0 kali hadir**
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	**2 kali hadir**
2	Nama Anggota Dewan Komisaris	**ASTRI NOVANITA ALI**
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	**0 kali hadir**
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	**2 kali hadir**

Pelaksaan rapat dengan Dewan Komisaris dilakukan melalui zoom yang dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

15.1 Jumlah Penyimpangan Intern (Internal) oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	**0 kasus**

15.2 Jumlah Penyimpangan Intern (Internal) oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	**0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	**0 kasus**

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	**0 kasus**

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	**0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	**0 kasus**

Dalam semester pertama ini BPR tidak ada penyimpangan atau fraud oleh karyawan, direksi atau dewan komisaris yang dapat menimbulkan kerugian bagi BPR

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	**0 kasus**
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	**0 kasus**

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	**0 kasus**
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	**0 kasus**

BPR saat ini tidak dalam menghadapi permasalahan hukum yang dapat merugikan BPR.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

BPR tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

BPR Tapeunadana tidak melakukan kegiatan untuk Pemberian Dana untuk kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR TAPEUNADANA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Depok, 22 Juli 2025

PT BPR TAPEUNADANA

Darniadi	**Asnawi, SE**
Direktur Utama	Direktur